

PENDIDIKAN POLITIK BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK GENERASI MILINEAL

Nina Sa'idah Fitriyah^{1*}, Giyanto²), Senain³), Hari Susanto⁴).

^{1,2,3,4}Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

*Email Korespondensi : ninasaidah@unars.ac.id

Abstrak

Siswa sekolah menengah atas sebagai bagian integral dari generasi muda, memainkan peran penting dalam menentukan masa depan pemerintahan. Pada usia ini, mereka berada dalam fase kritis perkembangan pendidikan yang mempengaruhi kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor mereka. Namun, kurangnya pendidikan politik yang tepat membuat mereka rentan terhadap manipulasi politik dan propaganda. Meskipun ada larangan aktivitas politik di lembaga pendidikan, praktik kampanye terselubung tetap terjadi, membahayakan integritas pendidikan politik. Pendidikan politik yang diberikan selama ini tidak memadai, dengan sebagian besar siswa tidak menerima pemahaman politik yang benar. Ini berdampak pada rendahnya kesadaran politik dan partisipasi aktif dalam demokrasi. Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu adanya edukasi Pendidikan politik pada siswa-siswi sekolah menengah atas dalam pemanfaatan media sosial sebagai sumber informasi politik masih belum maksimal, sering kali disertai dengan penyebaran berita palsu (hoaks). Adapun tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk memberikan edukasi kepada siswa-siswi sekolah menengah atas tentang Pendidikan politik berbasis teknologi informasi untuk generasi milenial. Tahapan metode pengabdian kepada Masyarakat dilakukan secara langsung dengan memberikan pelatihan kepada siswa-siswi terkait Pendidikan politik. Luaran yang ditargetkan berupa publikasi di prosiding UNARS, dan video kegiatan di kanal YouTube Chanel (@unarsofficial).

Kata kunci: pendidikan politik, teknologi informasi

Abstract

High school students as an integral part of the younger generation, play a crucial role in determining the future of government. At this age, they are in a critical phase of educational development that affects their cognitive, affective, and psychomotor abilities. However, the lack of proper political education makes them vulnerable to political manipulation and propaganda. Despite the ban on political activities in educational institutions, the practice of covert campaigns still occurs, endangering the integrity of political education. The political education provided so far has been inadequate, with most students not receiving a correct understanding of politics. This has an impact on low political awareness and active participation in democracy. Based on these problems, it is necessary to have political education for high school students the use of social media as a source of political information is still not optimal, often accompanied by the spread of fake news (hoaxes). The purpose of community service activities is to provide education to high school students about information technology-based political education for the millennial generation. The stages of the community service method are carried out directly by providing training to students related to political education. The targeted outputs are in the form of publications in UNARS proceedings, and video activities on the Chanel YouTube channel (@unarsofficial).

Keywords: political education, information technology

PENDAHULUAN

Keberadaan siswa sebagai bagian yang tak terpisahkan dari generasi muda saat ini memiliki andil yang cukup besar dalam menentukan laju pemerintahan. Para siswa tersebut dapat dikatakan sebagai tulang punggung negara karena di pundak merekalah masa depan bangsa ini akan digantungkan.

Usia SMA merupakan usia yang dikatakan masih labil. Tetapi pada usia ini masa-masa yang paling menentukan dalam proses pendidikan seorang individu karena dalam usia ini ia mencoba menyerap berbagai konsep keilmuan dan mengaplikasikannya secara langsung dalam masyarakat. Dalam usia tersebut, seorang individu sedang berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengembangkan berbagai aspek yang ia miliki, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotoriknya. Oleh karena itu, pada usia ini sangat mudah untuk menanamkan konsep tentang berbagai hal yang baru. Konsep yang diserap tersebut termasuk juga didalamnya adalah berbagai konsep mengenai politik. Hal ini menjadi penting agar kelak mereka tidak buta politik dan menjadi sasaran pembodohan politik, karena pada dasarnya usia SMA ini merupakan jumlah yang menjanjikan untuk dijadikan sebagai target untuk mendulang suara dari pemilih pemula dalam sebuah kegiatan politik seperti Pemilu. Maka dari itu sangatlah relevan dunia pendidikan bisa menjadi basis yang strategis untuk menaikkan pamor politik. Tak heran jika para caleg berupaya meraih simpati dari kalangan siswa.

Sejatinya sudah ada larangan beraktifitas politik atau berkampanye di lembaga pendidikan. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Namun dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan, para pelaku politik praktis ini tetap melakukan aktifitas politik di lingkungan sekolah meski dengan secara terselubung. Bagaimanapun bentuknya, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, kampanye politik merupakan bentuk paparan yang telah mengarah pada politik praktis. Dengan paparan dan ancaman propaganda politik yang semakin besar ini generasi muda harus dibekali moral dan pengetahuan yang baik tentang politik.

Selama menuntut ilmu di bangku pendidikan, para siswa tampaknya tak pernah mendapatkan pendidikan politik secara benar. Pembelajaran politik secara langsung di tengah-tengah kehidupan masyarakat melalui media dapat dikatakan jauh dari pendidikan politik yang ideal. Penanaman konsep politik pada usia SMA sangat penting agar mereka tidak mendapat konsep yang salah dan keliru tentang politik. Pentingnya pendidikan politik pada masa remaja sangat menentukan tingginya tingkat kesadaran politik seseorang. Semakin awal seorang individu mendapat pembelajaran tentang politik maka semakin tinggi kesadarannya untuk mau berpartisipasi langsung dan mampu untuk mengemban tanggung jawab sebagai warga negara yang baik.

David Easton (Sirozi, 2005: 49) mengatakan bahwa 'salah satu kondisi fundamental untuk mempertahankan suatu sistem politik adalah bahwa ketika generasi muda dalam suatu masyarakat menginjak dewasa, mereka harus menguasai ilmu pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap sebagaimana diharapkan oleh para anggota dan sistem yang ada'. Berdasarkan pendapat David Easton tersebut, terlepas dari apakah sistem politik negara tersebut baik atau buruk, jika sistem tersebut ingin tetap berlanjut, maka dalam artian luas sistem tersebut harus mampu mendidik anggota masyarakatnya, terutama generasi muda untuk memainkan peran-peran tertentu yang diharapkan dari mereka.

Pendidikan politik memegang peranan penting untuk dapat mendidik generasi muda agar mendapat pemahaman yang jelas terhadap berbagai konsep dan simbol politik, terutama dalam membentuk kesadaran politiknya. Pendidikan politik menjadi sarana bagi para pemuda untuk mematangkan pemahamannya terhadap orientasi politik fundamental yang mesti dimiliki untuk dapat membentuk kesadaran politik yang tinggi. Kesadaran politik yang dimiliki seseorang tidak datang dengan sendirinya namun melalui proses yang panjang. Walaupun keluarga, media massa dan pengalaman politik turut menentukan proses pembentukan kesadaran politik seseorang, namun peranan lembaga- lembaga pendidikan pun tidak bisa dikesampingkan. Proses tersebut dapat diperoleh melalui berbagai jalur pendidikan baik itu jalur formal maupun jalur informal. Dalam jalur formal, yaitu melalui jalur persekolahan, seorang individu dapat lebih mudah mengenal dan rnengetahui konsep-konsep tentang politik karena telah direncanakan dan telah disusun secara terperinci melalui kurikulum yang ada.

Kurikulum di persekolahan sebagai komponen terpenting pendidikan, pada dasarnya dapat dijadikan media pendidikan politik untuk menanamkan dan membentuk tumbuhnya kesadaran politik. Hal ini didasarkan dari sumber utama pembuatan kurikulum di lembaga pendidikan tersebut. Sudijono Sastroatmodjo (1995: 27) memberikan komentarnya mengenai hubungan pendidikan dengan tingkat kesadaran politik seseorang sebagai berikut:

“Tingkat pendidikan memiliki peranan penting dalam rneningkatkan kesadaran politik. Makin tinggi tingkat pendidikan masyarakat menjadi makin tinggi kesadaran politiknya. Demikian sebaliknya, semakin rendah tingkat pendidikan masyarakat maka makin rendah pula tingkat kesadaran politik masyarakat.”

Siswa mendapat pengetahuan dan pemahaman politik di sekolah melalui pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Memang dapat dikatakan bahwa semua mata pelajaran memiliki tujuan yang baik yaitu mendidik siswanya agar dapat menjadi warga negara sesuai harapan. Namun pada dasarnya mata pelajaran yang secara khusus mendidik siswa untuk menjadi warga negara yang baik (*to be good citizenship*) dibebankan kepada Pendidikan Kewarganegaraan karena materi yang termuat didalamnya banyak mengangkat tentang politik. Sekolah dengan berbagai perangkatnya antara lain kurikulum, buku-buku teks, metode pengajaran, organisasi-organisasi yang ada di sekolah, lingkungan kelas, siswa, guru, struktur administrasi dan lain-lainnya, dapat secara eksplisit maupun implisit terkait dengan transisi orientasi politik fundamental. Orientasi politik fundamental biasanya terbentuk pada usia dini. Orientasi politik yang terbentuk pada usia tersebut akan berakar sangat kuat dan terus berlanjut sepanjang hayat, terkecuali jika terdapat lingkungan sangat kuat yang mempengaruhi individu tersebut.

Aspek kesadaran politik bukan hanya meliputi aspek kognitif saja namun juga harus melibatkan aspek afektif dan aspek psikomotor. Oleh karena itu, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dianggap tepat karena secara langsung mampu memberikan fasilitas yang lengkap bagi siswa untuk dapat mengembangkan ketiga aspek tersebut dalam memahami berbagai konsep tentang politik.

Penggunaan media sosial dalam kehidupan mahasiswa dalam membangun pengetahuan terkait politik saat ini tidak berjalan maksimal. Hal tersebut disebabkan karena sering beredar berita-berita atau informasi yang tidak sesuai dengan fakta (*Hoax*) (R. Juwandi ,2019). Permasalahan tersebut juga terjadi pada siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri dalam pemanfaatan sosial media dalam membangun pengetahuan politik masih

dalam kategori kurang, selain karena permasalahan di atas, maka penting untuk mendapatkan Pendidikan politik dalam memanfaatkan media sosial untuk mencari informasi terkait pengetahuan tentang pendidikan politik sehingga dapat meningkatkan partisipasi yang lebih baik.

Berdasarkan fenomena di atas, maka penting bagi siswa-siswi dalam memanfaatkan media sosial untuk membangun pengetahuan politik yang merupakan bagian dari membangun sikap kewarganegaraan, dan juga membangun pengetahuan dalam mengatasi beredarnya informasi-informasi yang tidak sesuai dengan fakta.

METODE

Metode pelaksanaan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi politik generasi milenial melalui penggunaan teknologi informasi. Berikut adalah langkah-langkah yang akan diambil dalam pelaksanaan program ini sebagai berikut:

1. Perencanaan Awal dan Analisis Kebutuhan

Melakukan survei dan wawancara dengan siswa, dan guru untuk memahami tingkat pemahaman politik saat ini dan kebutuhan edukasi politik di kalangan generasi milenial serta mengidentifikasi gap dalam pengetahuan politik dan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk pendidikan politik.

2. Sosialisasi Guru dan Siswa

Mengadakan sosialisasi bagi guru dan siswa mengenai pengetahuan pendidikan politik berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi guru dalam menyampaikan materi pendidikan politik berbasis teknologi

3. Kampanye Edukasi melalui Media Sosial

Memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Twitter, TikTok, dan YouTube untuk menyebarkan informasi dan konten edukasi politik untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan kesadaran politik melalui konten yang menarik dan mudah dipahami.

4. Game dan Simulasi Politik

Mengembangkan game edukasi dan simulasi politik yang memungkinkan siswa untuk belajar melalui pengalaman interaktif untuk meningkatkan minat dan pemahaman siswa terhadap proses politik melalui metode pembelajaran yang menyenangkan.

5. Evaluasi dan Umpan Balik

Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas program melalui survei, tes, dan feedback dari peserta untuk menilai kemajuan siswa dalam memahami politik dan menyesuaikan program untuk meningkatkan hasil belajar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi tentang pendidikan politik berbasis teknologi informasi di kalangan generasi milenial dilakukan pada siswa-siswi kelas X dan XI SMKN 1 Klabang Bondowoso dengan jumlah 60 siswa. Sosialisasi ini dilakukan oleh empat dosen dan dibantu oleh dua mahasiswa. Adapun karakteristik siswa dapat disajikan pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Karakteristik Siswa SMK Negeri 1 Klabang

Variabel	Jumlah	Persentase((%)
Umur:		
14 tahun	25	10%
15 tahun	5	15%
16 tahun	15	50%
17 tahun	15	25%
Jenis Kelamin:		
Laki-laki	22	35%
Perempuan	38	65%
Tempat tinggal:		
Bersama orang tua	45	95%
Saudara	5	1%
Kos kosan	10	4%
Kelas		
Kelas X	35	65%
Kelas XI	25	35%

Berdasarkan pada tabel 1 tentang karakteristik siswa, dapat dijelaskan bahwa siswa yang mengikuti sosialisasi pendidikan politik dapat diidentifikasi berdasarkan umur, jenis kelamin, dan tempat tinggal serta klas. Untuk kelompok umur dengan rincian sebagai berikut: a) siswa dengan umur 14 tahun berjumlah 25 orang, b) siswa dengan umur 15 tahun berjumlah 5 orang, c) siswa yang berumur 16 tahun berjumlah 15 orang, dan d) siswa yang berumur 17 tahun berjumlah 15 orang. Hal ini berarti bahwa siswa yang mengikuti sosialisasi narkoba didominasi oleh kalangan siswa yang berumur 14 tahun.

Untuk identifikasi berdasarkan jenis kelamin, siswa laki-laki berjumlah 22 orang, dan perempuan berjumlah 38 orang, ini menunjukkan bahwa yang mengikuti sosialisasi pendidikan politik masih banyak siswa kaum perempuan, dengan selisih hampir 50%.

Tabel 2. Pengetahuan siswa tentang pendidikan politik sebelum dan sesudah sosialisasi

Variabel	Jumlah	Persentase (%)
Pengetahuan sebelum sosialisasi:		
Baik	25	45%
Cukup baik	20	40%
Kurang	15	15%
Pengetahuan sesudah sosialisasi:		
Baik	40	65%
Cukup baik	15	25%
Kurang	5	10%

Berdasarkan pada tabel 2 tentang pengetahuan siswa terkait pendidikan politik sebelum dan sesudah sosialisasi dapat dijelaskan bahwa sebelum sosialisasi tentang pendidikan politik, pengetahuan siswa yang masuk kategori baik berjumlah 25 orang (45%), pengetahuan siswa yang masuk dalam kategori cukup baik berjumlah 20 orang (40%), dan pengetahuan siswa yang masuk dalam kategori kurang berjumlah 15 orang (15%).

Pengetahuan siswa tentang pendidikan politik sesudah dilakukan sosialisasi berdasarkan pada tabel 2 menunjukkan bahwa ada peningkatan yang sangat signifikan dengan rincian

sebagai berikut: pengetahuan siswa tentang pendidikan politik masuk dalam kategori baik berjumlah 40 orang (65%), pengetahuan siswa tentang pendidikan politik yang masuk dalam kategori cukup baik berjumlah 15 orang (25%), dan pengetahuan siswa tentang pendidikan politik yang masuk dalam kategori kurang berjumlah lima orang (10%). Adapun sosialisasi yang dilakukan sebagaimana gambar berikut :



Gambar 1. Sosialisasi Pendidikan Politik Berbasis Teknologi Informasi

KESIMPULAN

Sosialisasi tentang pendidikan politik berbasis teknologi informasi yang dilaksanakan di SMKN 1 Klabang Kabupaten Bondowoso selama satu hari. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada peningkatan jumlah siswa yang masuk dalam kategori baik terkait dengan pengetahuan tentang pendidikan politik yaitu dari awal yang berjumlah 25 orang (45%) menjadi 40 orang (65%) (lihat tabel 2 tentang Pengetahuan siswa tentang pendidikan politik sebelum dan sesudah sosialisasi), ini menunjukkan bahwa sosialisasi tentang pendidikan politik dapat dinyatakan berhasil dengan baik.
2. Ada penurunan jumlah siswa yang masuk dalam kategori cukup baik, dari 20 orang (40%) menjadi 15 orang (25%) (lihat tabel 2 tentang Pengetahuan siswa tentang pendidikan politik sebelum dan sesudah sosialisasi), sebagian dari mereka pengetahuannya berubah dari cukup baik menjadi baik. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan siswa tentang Pendidikan politik meningkat signifikan.
3. Ada penurunan jumlah siswa yang masuk dalam kategori kurang, yaitu dari 15 orang (15%) menjadi lima orang (10%) (lihat tabel 2 tentang Pengetahuan siswa tentang pendidikan politik sebelum dan sesudah sosialisasi), ini menunjukkan bahwa pengetahuan mereka tentang pendidikan politik berbasis teknologi informasi menjadi meningkat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penyampaian ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang paling berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut:

1. Rektor Universitas Abdurachman saleh Situbondo
2. Kepala Sekolah SMKN 1 Klabang Kabupaten Bondowoso yang telah memberikan izin untuk melaksanakan pengabdian

REFERENSI

- Muhammad Sirozi. 2005. *Politik pendidikan: Dinamika hubungan antara kepentingan kekuasaan dan praktik penyelenggaraan pendidikan*. Raja Grafindo Persada
- Sastroatmodjo, Sudijono. 1995. *Partisipasi Politik*. Semarang : IKIP Semarang. Press.
- Setiyawati, Ambar. 2013